

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Skripsi

Penerapan Fungsi Surat Kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim Dalam Memberitakan Kasus Tahura Bukit Soeharto

B. Sub Judul Skripsi

Analisis Isi Penerapan Fungsi Surat Kabar dalam Memberitakan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Hauling Tahura Bukit Soeharto Sebagai Hutan Raya dan Kawasan Pertambangan di SKH Kaltim Post dan SKH Tribun Kaltim Periode 1 Juli– 31 Juli 2011

C. Latar Belakang

Dalam menyambut hari Keanekaragaman Hayati Dunia, 22 Mei 2007 yang lalu, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas ketiga di dunia dan ditempatkan pada urutan kedua dalam hal tingkat keanekaragaman hayatinya (Witoelar, 2007). Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, pemerintah menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu sumber devisa negara yang utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tetapi dalam prakteknya, pemanfaatan potensi hutan tidak diimbangi dengan upaya pemeliharaan

lingkungan yang berkelanjutan (Pressario, 2011). Padahal untuk melakukan perbaikan hutan, diperlukan waktu yang sangat lama karena siklus regenerasi hutan tropis memakan waktu yang lama (Hidayat, 2008:26).

Selain pemerintah, perusahaan pertambangan juga memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal atau tanpa prosedur perundang-undangan. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.P43/Menhut-11/2008 yang merupakan penjabaran dari UU No.41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan eksplorasi, perusahaan harus mempunyai izin pinjam pakai terlebih dahulu. Tetapi pada kenyataannya, beberapa perusahaan pertambangan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan sehingga menimbulkan konflik, yaitu pertambangan ilegal.

Propinsi di Indonesia yang memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah adalah Kalimantan Timur. Untuk menjaga hutan tropis tetap terjaga dengan baik, maka propinsi tersebut harus memiliki sebuah alat yang dapat menginformasikan kondisi masalah-masalah lingkungan yang mungkin saja dapat terjadi. Tujuannya adalah agar tidak hanya pihak kehutanan yang menjaga hutan tersebut dengan baik, tetapi juga masyarakat yang memiliki ketergantungan akan hutan tersebut perlu mengetahui dan memiliki keinginan untuk menjaga hutan tersebut.

Pada artikel Kaltim Post, 12 Juli 2011 berjudul "*Gubernur : Keputusan Akhir dari Menteri*" disebutkan bahwa Bukit Soeharto ditetapkan sebagai taman Hutan Wisata Alam sejak tahun 1991 melalui SK Menhut 270/Kpts II/1991 pada 20 Mei 1991. Kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan

konservasi yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Ruyadi, 2009). Masalah yang melekat pada hutan ini adalah berkaitan dengan lingkungan sekaligus usaha tambang. Tahura Bukit Soeharto adalah hutan yang berfungsi untuk pendidikan, wisata dan konservasi. Tetapi pada kenyataannya, telah digunakan sebagai kawasan pertambangan karena mengikuti SK Menhut No. 577 tahun 2009 (Kaltim Post, 7 Juli 2011 halaman 1). Perubahan fungsi ini menyebabkan rusaknya lingkungan hutan raya yang dapat merugikan masyarakat sekitar dan juga makhluk hidup lainnya.

Penggunaan hauling juga menjadi persoalan di Tahura Bukit Soeharto. Hauling adalah jalan transportasi sementara yang berlokasi di kawasan hutan. Ada persepsi mengungkapkan bahwa penggunaan hauling ini melanggar peraturan atau dapat disebut bertentangan dengan peraturan. Hauling di Tahura bukit Soeharto memang telah ada sejak dulu saat perusahaan pemegang hak perusahaan hutan (HPH) beroperasi di Tahura (Kaltim Post, 7 Juli 2011 halaman 10). Penggunaan hauling juga menjadi pertanyaan simpang siur apakah penggunaan ini akan bermanfaat untuk pelestarian Tahura Bukit Soeharto atau justru sebaliknya.

Rusaknya lingkungan hutan raya Bukit Soeharto tentu mendapat perhatian media massa, terutama media massa lokal. Media massa adalah wadah di mana wartawan dapat menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan realita dan fakta yang ada (Setiati, 2005:68). Media massa memiliki empat keunggulan, yaitu berpotensi memunculkan isu atau konflik, menenggelamkan suatu isu atau konflik, menjadi mediator dengan cara mengadakan berbagai sudut pandang dan

mengarahkan pada penyelesaian konflik, serta sebagai pembentuk opini publik (Setiati, 2005:68). Dengan empat keunggulan tersebut, media memposisikan dirinya sebagai alat kontrol terhadap penuntasan izin pertambangan ilegal di kawasan hutan raya. Jika pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap Tahura Bukit Soeharto memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga hutan dengan cara-cara solusi penjagaan lingkungan, maka media massa melakukan penjagaan hutan dengan cara melakukan pengawasan, yaitu memberitakan apa yang terjadi pada kawasan tersebut kepada masyarakat, dan memberikan solusi melalui pemberitaan tersebut.

Beberapa media massa akhir-akhir ini menggunakan jurnalisme lingkungan dalam memberitakan kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan. Peneliti menemukan dua penelitian yang berkaitan dengan penerapan jurnalisme lingkungan. Peneliti mengambil beberapa contoh topik yang sama untuk menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup yang dirusak oleh manusia perlu mendapat perhatian. Penelitian yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dilakukan oleh Aninda Haswari yang meneliti tentang penerapan jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan eksploitasi hutan di Indonesia pada SKH Kompas. Aninda beranggapan pentingnya peran media massa dalam menginformasikan peristiwa yang terjadi serta mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup (Aninda, 2010).

Penelitian selanjutnya yang juga berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dikemukakan oleh Elizabeth Paulina Dewi Trikurniawati. Ia meneliti tentang penerapan jurnalisme lingkungan pada pemberitaan bencana pergerakan

tanah Jawa Barat di SKH Kompas dan Pikiran Rakyat. Elizabeth juga beranggapan bahwa peran media massa dan pers penting untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan mengoreksi serta mengontrol masalah lingkungan hidup (Elizabeth, 2010).

Peneliti mengetahui bahwa kasus Tahura Bukit Soeharto ini mendapat perhatian dari dua media massa daerah di Kaltim, khususnya surat kabar lokal, yaitu Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Maka peneliti memilih dua surat kabar lokal ini untuk melihat fungsi surat kabar yang telah dijalankan oleh dua surat kabar lokal tersebut. Kaltim Post dan Tribun Kaltim dipilih karena kedua surat kabar lokal ini berasal dari dua grup media besar di Indonesia. Kaltim Post merupakan anak perusahaan dari kelompok Jawa Pos Grup (Jawa Pos, 2011), sedangkan Tribun Kaltim merupakan anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia (Kompas Gramedia, 2011). Hal ini menunjukkan apakah fungsi media diterapkan pada kedua surat kabar lokal yang berasal dari dua grup besar tersebut. Penerapan adalah kata lain dari proses berlakunya suatu hal. Penerapan ibarat pemasangan nilai-nilai penting yang akan membawa ke arah lebih baik. Ketika surat kabar dapat melakukan proses terapan fungsi media massa, maka surat kabar sedang menuju proses ke arah lebih baik untuk khalayak.

Kaltim Post dengan mottonya yaitu media massa terbesar dan pertama (Kaltim Post, 2011), karena lahir pada tahun 1988 dan menjadi surat kabar pertama yang lahir di Kalimantan Timur, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartini Rolitta Sibarani

terhadap Kaltim Post, ia memaparkan bahwa Kaltim Post adalah surat kabar lokal di Kalimantan Timur yang memiliki idealisme untuk membangun Kaltim dari segala sektor, mulai sektor politik, pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Komitmennya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di pelosok tanah air juga mendukung peran Kaltim Post untuk menyampaikan informasi dan edukasi serta berperan sebagai pengawas dan alat kontrol terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah Kaltim.

Selain sektor-sektor di atas, Kaltim Post juga merupakan surat kabar lokal yang memiliki frekuensi sering melakukan pemberitaan mengenai pertambangan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya pada Kaltim Post edisi 27 Agustus 2011. Pada edisi ini, ada tiga artikel berita yang berkaitan dengan masalah pertambangan ilegal sekaligus menyoroti dampak perusakan lingkungan yang terjadi yang disebabkan oleh usaha pertambangan. Artikel Kaltim Post tersebut berjudul "*Main Sendiri, Penambang Ilegal Ditangkap*", kemudian artikel "*PT PP Komitmen Jaga Lingkungan*" dan yang terakhir adalah artikel yang berjudul "*Sanksi Dinilai Setengah Hati*". Surat kabar Kaltim Post sadar bahwa pentingnya memiliki alat kontrol dan pengawasan pada masalah perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal. Data di atas yang terkumpul menunjukkan bahwa Kaltim Post masih memberikan perhatian yang cukup besar pada item berita lingkungan sekaligus pertambangan.

Ketika masyarakat protes terhadap kasus izin usaha pertambangan sekaligus prihatin akan kondisi Tahura Bukit Soeharto, golongan atau kelompok-kelompok tertentu serta organisasi maupun lembaga seperti pemerintah belum tentu akan

menanggapi protes langsung dari masyarakat setempat. Tetapi ketika Kaltim Post mulai membahas kasus tersebut dalam surat kabar, kasus ini akan mulai menjadi daya tarik beberapa lembaga masyarakat, lembaga hukum dan pemerintah. Cara Kaltim Post untuk memberi daya tarik kepada beberapa lembaga masyarakat, lembaga hukum dan pemerintah adalah dengan melibatkan beberapa sumber berita yang berkompeten dan terjun langsung dalam kasus izin usaha pertambangan di Tahura Bukit Soeharto. Beberapa sumber berita dimasukkan dalam pemberitaan untuk mengetahui pendapat-pendapat dan mencari solusi bersama-sama melalui surat kabar. Penjelasan singkat mengenai awal terjadinya kasus juga sering dibahas dalam beberapa berita tentang Tahura yang akan diteliti. Kaltim Post paham bahwa kasus tidak akan dapat dimengerti oleh masyarakat Kalimantan Timur ketika tidak ada penjelasan awal.

Tribun Kaltim adalah surat kabar lokal yang memiliki motto independen dan kredibel (Tribun Kaltim, 2011). Media yang lahir pada tahun 2003 ini juga memiliki kepentingan yang sama dengan Kaltim Post, yaitu mengawasi dan menjadi alat kontrol terhadap masalah-masalah yang terjadi di Kaltim. Hal tersebut terlihat pada isi pemberitaan Tribun Kaltim edisi 12 juli 2011, yaitu mengenai izin pinjam pakai Tahura Bukit Soeharto. Tribun Kaltim membahas kasus tersebut pada halaman yang sama dengan tiga berita yang berhubungan dengan kasus Tahura Bukit Soeharto, yaitu "*Awang Minta Menhut Kaji Ulang*", kemudian "*Jangan Cuma Wacana*" dan "*Bupati Kukar Harus Cabut*". Penempatan tiga berita dengan kasus yang sama dalam satu halaman menunjukkan eksistensi surat kabar tersebut pada masalah pertambangan dan

keselamatan lingkungan. Dengan melakukan frekuensi pemberitaan yang hampir sering pada kasus ini, Tribun Kaltim juga membantu mencari solusi permasalahan melalui bermacam-macam sumber berita yang diwawancarai. Sumber berita sebagian besar dipilih dari orang-orang yang memang berkompeten dalam hal pertambangan serta perundang-undangan yang mengatur kehutanan. Dengan menggunakan berbagai macam sumber berita, masyarakat pembaca dapat melihat peristiwa secara mendalam.

Walau usia Tribun Kaltim masih tergolong muda, yaitu 8 tahun dalam memberitakan peristiwa dan kasus-kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara (Tribun Kaltim, 2011), Tribun Kaltim telah memiliki bermacam prestasi yang dapat dibanggakan. Berbagai prestasi ini menunjukkan bahwa Tribun Kaltim sedang menuju ke arah pemberitaan yang kredibel dan independen sesuai dengan mottonya.

Dalam melakukan pemberitaan, surat kabar perlu menerapkan fungsi media massa agar pemberitaannya memiliki tujuan dan target. Kaltim Post dan Tribun Kaltim sebagai dua surat kabar lokal yang berada di Kaltim dan anak dari dua grup media besar seharusnya telah melakukan fungsi media massa agar media massa lokal lainnya khususnya surat kabar di Kaltim yang masih berkembang dapat mengikuti sistem kerja dari kedua surat kabar harian ini sekaligus menjadi pedoman dalam kewartawanan. Peranannya sebagai sebuah pers yang memiliki alat kontrol, harus ditunjukkan melalui fungsi media. Dalam pemberitaan tentang izin usaha pertambangan dan izin hauling, masing-masing pers mencoba untuk memberikan sikap dan cara pandangnya yang kemudian muncul dalam setiap

berita yang ditulis.

Sekilas melihat seluruh berita dalam kedua surat kabar harian tersebut, peneliti menduga bahwa surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim baru menerapkan salah satu fungsi media seperti yang dikemukakan Laswell dalam buku *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan* (Laswell dalam Setiati, 2005: 72), yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini sepertinya tampak ketika kedua media cetak ini memberitakan kasus izin usaha pertambangan sekaligus masalah izin hauling yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kaltim sampai tahun 2011. Fungsi pengawasan sepertinya tampak pada artikel Tribun Kaltim edisi 4 Juli 2011, tentang pernyataan aparat hukum dapat mengambil tindakan tegas. Pernyataan ini mungkin dikategorikan sebagai fungsi pengawasan yang ditujukan kepada perusahaan yang masih berani melakukan usaha pertambangan di Tahura.

Fungsi pengawasan sepertinya juga tampak pada isi berita Kaltim Post edisi 19 Juli 2011 tentang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Pemberitaan terjadi sepertinya untuk melakukan pengawasan bagi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Tahura. Dugaan sementara ini masih menjadi tanda tanya bagi peneliti apakah fungsi pengawasan benar-benar diterapkan pada surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim.

Selain fungsi pengawasan, surat kabar juga memiliki banyak fungsi yang dapat dimasukkan dalam isi berita. Dasar inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah fungsi pengawasan ini telah diterapkan di tiap isi berita dan apakah ada fungsi surat kabar lain yang juga diterapkan di kedua surat kabar lokal ini yaitu Kaltim Post dan Tribun Kaltim serta seberapa besar

penerapan fungsi surat kabar berjalan pada surat kabar harian Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli– 31 Juli 2011?

D. Rumusan Masalah

Apakah Kaltim Post dan Tribun Kaltim telah menerapkan fungsi surat kabar dalam memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan di Kalimantan Timur pada periode 1 Juli– 31 Juli 2011?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk melihat apakah Kaltim Post dan Tribun Kaltim telah menerapkan fungsi surat kabar dalam memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan di Kalimantan Timur pada periode 1 Juli– 31 Juli 2011.

F. Manfaat Penelitian

Menambah pengetahuan peneliti mengenai Kaltim Post dan Tribun Kaltim yang menerapkan fungsi surat kabar dalam memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan di Kalimantan Timur pada periode 1 Juli– 31 Juli 2011.

G. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teoritik tersebut adalah mengenai konsep fungsi media massa pada pemberitaan.

G.1. Fungsi Media Massa

Media massa berperan aktif ketika ada komunikasi massa dalam media tersebut. Media massa adalah sebuah alat yang mendukung komunikasi massa terjadi. Bentuk dari media massa adalah media elektronik yaitu televisi dan radio, media cetak yaitu surat kabar, majalah dan tabloid, serta buku dan film (Nurudin, 2007:5).

Komunikasi massa pada dasarnya mempunyai proses yang melibatkan beberapa komponen (Winarso, 2005:18). Dua komponen utama tersebut adalah komunikator sebagai sumber pesan (*encoded*) dan komunikan sebagai penerima pesan (*decoded*). Komponen pendukungnya adalah pesan sebagai bahan interaksi, saluran sebagai penghubung antara komunikator dan komunikan serta *feedback* sebagai tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada sumber pesan. Komponen-komponen ini akan melancarkan komunikasi massa yang terjadi pada media massa.

Dalam komunikasi massa, yang menjadi komunikator sebagai sumber pesan adalah media massa itu sendiri. Menurut Alexis S. Tan, dalam komunikasi massa komunitasnya adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkannya secara serempak ke sejumlah orang banyak yang terpisah (Tan dalam Nurudin, 2007:11). Media massa disebut komunikator karena terdiri dari beberapa individu yang memiliki tanggung jawab dalam proses komunikasi massa tersebut.

Ketika melakukan proses komunikasi massa, media massa tidak pernah melepaskan fungsinya agar pesan yang ingin disampaikan memiliki arah dan

tujuan yang jelas untuk masyarakat. Lasswell dalam bukunya “The Structure and Function of Communication in Society” telah mendiskusikan tiga fungsi atau tujuan dari komunikasi dalam suatu masyarakat (Laswell dalam Winarso, 2005:21). Fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan, fungsi korelasi dan fungsi pewarisan sosial. Selain ketiga fungsi tersebut, peneliti juga akan menambah satu fungsi komunikasi massa lainnya yang juga tidak kalah penting. Fungsi tersebut diambil dari John Vivian yaitu fungsi kohesi sosial (Vivian dalam Nurudin, 2007:64).

a) Fungsi pengawasan (*surveillance*)

Laswell mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan ialah menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar manusia (Laswell dalam Nurudin, 2007:78). Fungsi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Bentuk pengawasan peringatan adalah ketika media massa memperingatkan khalayak mengenai ancaman-ancaman di sekitar manusia. Peringatan-peringatan ini dapat berupa ancaman mendadak dan ancaman jangka panjang (Winarso, 2005:29).

Ancaman mendadak misalnya bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh ancaman jangka panjang misalnya bahaya polusi udara dan akibatnya bagi kesehatan pernafasan manusia. Berita yang rutin dilakukan akan memunculkan cara pandang baru dari pembaca surat kabar lokal tersebut.

Fungsi pengawasan instrumental merupakan fungsi yang memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan (Winarso, 2005:29). Misalnya berita tentang film apa yang sedang

ditayangkan di bioskop, harga-harga saham di bursa efek, ide-ide tentang tren mode rambut, dan sebagainya adalah contoh-contoh pengawasan instrumental. Pemberitaan yang dilakukan secara rutin akan memberikan informasi berguna bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengambil keputusan. Ketika media massa melakukan fungsi pengawasan baik peringatan maupun instrumental, maka media massa berusaha untuk mengantisipasi khalayak dari ancaman serta secara tidak langsung menyuruh khalayak untuk dapat mengambil keputusan.

b) Fungsi korelasi

Fungsi korelasi merupakan fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya (Nurudin, 2007:82). Fungsi ini menghubungkan narasumber dengan masyarakat sehingga mereka bisa melakukan komunikasi melalui media massa. Misalnya pendapat ahli lingkungan yang peduli terhadap masalah lingkungan yang menjadi kawasan pertambangan dituangkan dalam artikel berita. Artikel berita yang ditampilkan akan dibaca oleh pembaca surat kabar lokal, termasuk pembaca yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian pembaca dapat memberikan pendapat lain dalam artikel berikutnya. Dalam posisi inilah media akan menjadi penghubung antara pembaca dengan pihak yang memiliki kaitan dengan kasus Tahura Bukit Soeharto.

Charles R. Wright juga mengatakan bahwa fungsi korelasi adalah menginterpretasikan pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian (Wright dalam Nurudin, 2007:83). Salah satunya dapat ditunjukkan melalui tajuk rencana. Tajuk rencana yang biasa ditulis

oleh pemimpin redaksi surat kabar adalah tempat menyuarakan pendapat dan sikap terhadap suatu berita atau peristiwa (Barus, 2010:142).

c) Fungsi pewarisan sosial

Fungsi ini menjadikan media massa sebagai pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Nurudin, 2007:86). Media massa bertanggung jawab dengan berita yang ditulis, tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mewariskan sesuatu yang masyarakat belum miliki. Pewarisan sosial berupa budaya. Budaya yang dimiliki manusia saat ini sebagian besar berasal dari media massa. Budaya meliputi tiga hal, yaitu ide atau gagasan, aktivitas, dan benda-benda hasil kegiatan (Nurudin, 2007:87). Tiga hal ini diwariskan kepada masyarakat untuk memperkuat kesepakatan nilai-nilai sosial.

Media tidak hanya mewariskan, tetapi juga harus mengenalkan ide-ide perubahan kepada masyarakat (Nurudin, 2007:87). Ide-ide perubahan yang ditawarkan masyarakat bahkan dapat bertolak belakang dari nilai-nilai sosial yang sebelumnya telah disepakati oleh masyarakat (Nurudin, 2007:88), sehingga media massa harus memilah budaya mana yang pantas untuk dikenalkan pada masyarakat.

d) Fungsi kohesi

Media massa mendorong masyarakat untuk bersatu (Nurudin, 2007:77). Media massa berfungsi sebagai penyatu antara semua pendapat dari berbagai pihak. Media massa harus mampu meliput berita dengan teknik *cover both sides*

atau meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang bahkan meliput dengan teknik *all sides* atau meliput peristiwa dari berbagai segi (Nurudin, 2007:77). Ketika media massa dapat memberitakan berita melalui dua teknik tersebut, maka media massa telah mewujudkan fungsi penyatuan tersebut.

Fungsi kohesi sosial dapat dihubungkan dengan integrasi sosial. Media massa yang mampu memberitakan suatu peristiwa secara berimbang, maka media juga menciptakan integrasi sosial. Adapun media massa yang dikelola karena materiil ataupun komersial, akan menciptakan disintegrasi sosial.

G.2. Berita

News atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar (Sumadiria, 2006:64). Ada juga definisi dari ahli lainnya, *news* atau berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut (Sumadiria, 2006:64). Definisi lainnya, berita atau *news* adalah laporan tentang peristiwa atau *event* dan atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian besar khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik (Wahyudi, 1991:115). Definisi yang lain yang disampaikan oleh pakar jurnalistik, Jakob Oetama, yaitu berita itu bukan fakta, tetapi laporan tentang fakta itu sendiri (Oetama dalam Barus, 2010:26). Ia mengatakan bahwa peristiwa bisa menjadi berita ketika wartawan menemukan dan melaporkan peristiwa tersebut, kemudian menjadikannya kesadaran publik melalui media massa. Setelah melihat beberapa

definisi dari ahli terkemuka, peneliti dapat mendefinisikan sendiri bahwa berita adalah suatu peristiwa yang memiliki nilai yang penting, memiliki makna bagi masyarakat, menarik perhatian serta minat masyarakat dan masih baru sehingga dipublikasikan ataupun dimuat secara luas melalui media massa periodik sehingga menjadi pengetahuan publik.

Ketika membicarakan berita, maka juga membicarakan fakta. Berita ada karena fakta yang diburu oleh wartawan. Fakta tidak dapat berdiri sendiri. Fakta dapat dihubungkan dengan fakta lainnya untuk melengkapi data hingga menjadi suatu berita. Fakta harus dikumpulkan dan diolah agar menjadi sebuah informasi yang berguna, penting, dan menarik bagi orang lain (Barus, 2010:27).

Untuk menentukan sebuah berita layak atau tidak untuk dimuat pada media massa, maka nilai berita menjadi kriteria penting dalam pemuatan berita. Kriteria ini harus dipegang teguh dan menjadi sebuah patokan oleh reporter atau wartawan dalam memburu fakta, sehingga pemimpin redaksi dan redaktur mudah memilih mana yang layak untuk dimuat dalam media. Nilai berita yang dapat dijadikan patokan untuk menjadikan fakta sebagai suatu berita (Barus, 2010:31-32), antara lain :

- a. Penting (*significance*)
Mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang banyak atau kejadiannya mempunyai akibat atau dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca.
- b. Besaran (*magnitude*)
Sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui oleh orang banyak.
- c. Kebaruan (*timeliness*)
Memuat peristiwa yang baru saja terjadi. Aktual berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian tersebut bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang sudah ditetapkan pemimpin redaksi
- d. Kedekatan (*proximity*)
Memiliki kedekatan jarak (geografis) ataupun emosional dengan pembaca. Termasuk kedekatan karena profesi, minat, bakat, hobi dan perhatian pembaca.
- e. Ketermukaan (*prominence*)
Hal-hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Suatu

peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca.

f. Sentuhan manusiawi (*human interest*)

Sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan, menggugah hati dan minat. Misalnya laporan berita mengenai kelaparan yang terjadi di Papua.

Untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dijadikan berita, wartawan tidak hanya mengandalkan 5W dan 1H, tetapi wartawan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat rumit (Barus, 2010:38). Dua hal ini diperlukan ketika ingin mendapatkan fakta, sehingga wartawan mengetahui apa jenis beritanya serta siapa yang menjadi sumber berita. Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang disusun oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), terdapat tiga pasal yang mengatur sumber berita. Pasal tersebut adalah pasal 9 hingga pasal 11. Inti dari pasal-pasal ini adalah sumber berita sangat dihargai sebagai fakta pendukung dari sebuah berita.

Untuk dapat mengorek fakta ataupun keterangan dari sumber berita, maka wartawan juga harus memiliki kepandaian bergaul. Watak pribadi wartawan juga diuji karena sifat ambiguitas yang dilakukan ketika menjalankan hubungan dengan sumber berita. Sifat ambiguitas itu terjadi ketika di satu sisi wartawan terikat oleh norma, etika profesi, serta teori jurnalistik dan nilai-nilai budaya masyarakat yang berlaku umum, tetapi di sisi lain wartawan dituntut untuk menjalankan dan menegakkan kebebasan pers (Barus, 2010:53).

Yang dapat disebut sebagai sumber berita adalah siapa saja yang dinilai mempunyai posisi mengetahui atau berkompeten terhadap suatu fakta, peristiwa atau kejadian, gagasan, serta data atau informasi yang bernilai berita (Barus, 2010:53-54). Tetapi tidak semua pihak mau dijadikan sumber berita jika pihak tersebut tidak ingin dimintai keterangan dan informasinya. Sumber berita dapat

dikelompokkan melalui jenis berita. Wartawan harus pintar untuk mencari sumber berita yang sesuai dengan jenis berita yang sedang dicari. Misalnya, untuk berita politik, maka wartawan perlu mencari narasumber yang berhubungan langsung dengan ahli politik ataupun yang berkompeten dalam hal politik. Masing-masing dari bidang pemberitaan tersebut selalu mencakup sumber-sumber sebagai berikut (Barus, 2010:56), antara lain :

- a. Sumber berita atas nama pribadi
Sumber ini meliputi orang-orang biasa, seperti pengunjung pameran, pembeli dalam pasar, dan sebagainya. Pakar di bidang suatu keahlian juga merupakan sumber berita atas nama pribadi, misalnya pakar hukum, ahli gizi, musisi dan sebagainya. Selain itu profesi juga dapat dimasukkan, misalnya polisi, dokter, supir taxi dan sebagainya.
- b. Sumber berita pribadi atas nama kelompok atau golongan
Sumber ini meliputi tokoh masyarakat, pimpinan bisnis fashion, serta para pimpinan yang mewakili komunitas tertentu.
- c. Sumber berita organisasi / lembaga / instansi
Sumber ini meliputi wakil rakyat daerah, lembaga swasta lingkungan dan sebagainya.

Di luar dari sumber-sumber di atas, wartawan juga tidak boleh melupakan berbagai sumber referensi dari mana saja yang masih berhubungan dengan fakta, untuk melengkapi fakta agar layak menjadi berita.

G.3. Berita Terkait Fungsi Media Massa

Pada dasarnya seorang jurnalis memburu fakta, agar memperoleh sebuah berita. Berita tidak hanya sebatas peristiwa yang diberitakan, tetapi berita terbentuk dari fakta-fakta yang dihubungkan kemudian diolah oleh jurnalis dengan pengetahuan dan keterampilan dari jurnalis. Seorang pakar sosiologi yaitu Herbert J. Gans mengatakan bahwa berita tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap realitas, berita juga mengandung nilai-nilai atau pernyataan pilihan (Gans dalam Severin dan Tankard, 2001:398). Berita hadir tergantung oleh pengemasan dari jurnalis itu sendiri. Jurnalis yang menentukan bagaimana isi penyajian berita tersebut dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui

berita tersebut. Berita tidak hanya sekedar diberitakan, tetapi harus memiliki nilai dan pernyataan pilihan yang kemudian akan mendapat respon dari khalayak pembaca. Ketika berita mendapat respon dari khalayak, maka fungsi surat kabar telah berjalan sesuai fungsinya.

Ahli Sosiologi Gaye Tuchman menyatakan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial (Tuchman dalam Severin dan Tankard, 2001:400). Jurnalis tidak lepas dari yang namanya mengonstruksi sebuah berita. Tuchman mengungkapkan bahwa tindakan membuat berita adalah tindakan mengonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambaran realita (Tuchman dalam Severin dan Tankard, 2001:400). Ketika realita maupun fakta telah dikonstruksi oleh jurnalis yang menghasilkan berita, maka pengadaan fungsi surat kabar sendiri adalah sebuah kesengajaan.

Kritik-kritik masih terus muncul untuk surat kabar, khususnya pada nilai berita dan teknik pemberitaan. Kritik untuk kedua hal ini sebenarnya sudah lama dan cukup banyak. Nilai berita dan teknik pemberitaan dikritik karena berkaitan dengan salah satu fungsi media, yaitu fungsi informasi. Tetapi fungsi media ini tidak terlalu menonjol dibandingkan fungsi media lainnya dalam isi pemberitaan kasus Tahura Bukit Soeharto. Inti kritik yang dilontarkan oleh kalangan jurnalis sendiri adalah pers dalam memberitakan sesuatu lebih menekan aspek sensasi daripada esensinya. Misalnya berita tentang pembunuhan, pencurian, dan korupsi (Rivers,dkk, 2003:328). Ketika aspek sensasi lebih ditonjolkan dalam pemberitaan, maka khalayak pembaca hanya sebatas tahu informasi dasar. Khalayak pembaca tidak diminta untuk berpikir secara bersama-sama untuk

mengambil sikap, nilai dan memiliki respon serta tanggung jawab dalam mencari solusi dari kasus tersebut.

Media sebagai alat kontrol sosial dilakukan secara ekstensif dan efektif (Rivers,dkk, 2003:38). Beberapa pengamat menganggap bahwa ketika media massa begitu ekstensif dan efektif, maka kekuatan media, khususnya surat kabar memang terletak pada bagian tersebut. Fakta dan peristiwa yang telah dikemas dan dikonstruksi menjadi sebuah berita kemudian disebar oleh surat kabar. Isi berita yang telah dikonstruksi dalam surat kabar dapat berupa penghalusan makna, sehingga tampak seperti sebuah bujukan (Rivers,dkk, 2003:39).

Fungsi media yaitu pengawasan, korelasi, pewarisan sosial dan kohesi dikontrol oleh sebuah isi berita yang ditulis seorang jurnalis media cetak. Berita yang berisi sebuah peristiwa hanya sebuah berita. Tetapi ketika isi berita dikontrol dan dikonstruksi oleh media, maka isi berita tersebut memiliki unsur fungsi media. Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat melalui keempat fungsi media tersebut. Sehingga ketika kelompok-kelompok kuat seperti parpol, lembaga-lembaga masyarakat, dan penguasa ingin mencapai tujuannya, maka ia harus melalui suatu media agar dapat mengendalikan masyarakatnya (Rivers,dkk, 2003:39).

H. Kerangka Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama (Bungin, 2001:73). Dalam membuat kerangka konsep, peneliti menggunakan proses koding agar

dapat mengetahui penerapan fungsi surat kabar dalam pemberitaan surat kabar harian Kaltim Post seputar izin pertambangan di Tahura Bukit Soeharto terkait fungsi media. Proses koding adalah suatu proses di mana data mentah secara sistematis ditransformasikan dan dikelompokkan dalam lima dimensi fungsi.

Unit-unit analisis yang akan dijabarkan pada tabel di bawah ini diturunkan dari kerangka teori yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti akan menurunkan semua teori fungsi media yang tersedia dalam kerangka teori menjadi dimensi fungsi dan unit analisis. Agar peneliti dapat melihat penerapan fungsi surat kabar apa saja yang dilakukan oleh kedua surat kabar lokal ini, maka peneliti juga memasukkan dimensi fungsi lain selain fungsi pengawasan. Berikut adalah penjabaran dari unit-unit analisis yang telah diturunkan dari teori :

TABEL 1.1.
Unit-unit Analisis Fungsi Media

Dimensi Fungsi	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
Pengawasan	Pengawasan Peringatan	Ancaman mendadak	1. Ada 2. Tidak ada
		Ancaman jangka panjang	1. Ada 2. Tidak ada
	Pengawasan Instrumental	Informasi	1. Ada 2. Tidak ada
Korelasi	Sumber Berita	Lembaga pemerintah	1. Ada 2. Tidak ada
		Lembaga penegak hukum	1. Ada 2. Tidak ada
		Lembaga swadaya masyarakat	1. Ada 2. Tidak ada
		Pakar	1. Ada 2. Tidak ada
		Akademisi	1. Ada 2. Tidak ada
		Pengusaha	1. Ada

			2. Tidak ada
		Perusahaan	1. Ada 2. Tidak ada
		Masyarakat	1. Ada 2. Tidak ada
Pewarisan Sosial	Nilai budaya yang tampak	Ide positif	1. Ada 2. Tidak ada
		Ide negatif	1. Ada 2. Tidak ada
		Aktivitas positif	1. Ada 2. Tidak ada
		Aktivitas negatif	1. Ada 2. Tidak ada
		Benda-benda hasil kegiatan	1. Ada 2. Tidak ada
Kohesi	Sudut Pemberitaan	Satu sisi	1. Ada 2. Tidak ada
		Dua sisi	1. Ada 2. Tidak ada
		Multi sisi	1. Ada 2. Tidak ada

I. Definisi Operasional

Kerangka konsep yang telah dibuat masih berbentuk abstraksi (Kriyantono, 2006:25). Abstrak maksudnya adalah belum ada pengoperasionalan dari tiap konsep, sehingga belum dapat diukur. Dalam penelitian ini, pengamatan diperlukan untuk menemukan hasil dari konsep. Peneliti kemudian melakukan operasional konsep, dengan cara memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang sedang diamati. Untuk dapat mengoperasionalkan konsep, maka peneliti dapat menjelaskan konsep berdasarkan parameter atau indikator-indikatornya (Kriyantono, 2006:26).

Unit analisis dan pengkategorian pada tabel di atas merupakan parameter atau indikator-indikator dari penelitian tersebut serta akan menjadi acuan peneliti

untuk melakukan analisis isi. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi media massa yang terdapat pada pemberitaan mengenai izin usaha pertambangan dan izin hauling di Tahura Bukit Soeharto, peneliti menjelaskan semua konsep dari tabel di atas sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan

Fungsi yang menyebarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh media agar masyarakat berjaga-jaga terhadap segala ancaman. Jenis dari fungsi pengawasan adalah fungsi pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Kedua fungsi ini menimbulkan kewaspadaan dari masyarakat serta masyarakat dapat mengambil keputusan terhadap informasi yang disebarkan. Pelaporan mengenai Surat Keputusan Menteri terkait dengan izin pertambangan memerlukan tahap-tahap yang detail dan akurat. Pelaporan yang detail dan akurat akan menambah wawasan masyarakat dan menumbuhkan kewaspadaan terhadap masalah tersebut. Sikap kepedulian media melalui pelaporan terhadap khalayak pembaca ditunjukkan melalui kategori-kategori sebagai berikut, yaitu :

1.a. Pengawasan peringatan

Fungsi yang memperingatkan khalayak mengenai ancaman-ancaman di sekitar manusia. Ancaman tersebut yaitu :

a) Ancaman mendadak, isi berita yang berupa ancaman yang dilakukan secara mendadak. Misalnya inspeksi mendadak, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP), penyerahan kasus ke pihak berwenang, penghentian operasi tambang, pemetaan ulang oleh tim dari pusat, aparat hukum turun tangan, penyeretan ke hukum kepada mantan Bupati Kukar, Bupati kukar dapat terseret hukum,

penelusuran dan penyeretan pengusaha ke pengadilan dan menimbulkan bencana banjir dan kekeringan.

1. Ada, jika mencantumkan isi berita seperti contoh di atas yang berupa ancaman mendadak dalam pemberitaan.

2. Tidak ada, jika tidak mencantumkan isi berita yang berupa ancaman mendadak dalam pemberitaan.

b) Ancaman jangka panjang, adalah isi berita berupa ancaman yang diberitakan secara rutin sehingga menyebabkan khalayak bersiap-siap ataupun berjaga-jaga. Misalnya, kerugian dan kerusakan besar pada Tahura, pengkajian ulang SK No.577/Menhut II/2009, penyelesaian rekomendasi, penjelasan awal mula masalah (IUP), ada 13 perusahaan tambang masuk dalam Tahura, penyampaian masalah kepada Staf Ahli Kepresidenan, penyelidikan pada operasi beberapa perusahaan tambang, aktivitas *illegal logging*, keinginan wewenang penuh Unmul di Tahura, pendugaan adanya motif lain yang memanfaatkan Surat Keterangan (SK) Menhut, pengujian kembali dokumen Amdal, pelaporan aparat hukum, dan musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen.

1. Ada, jika mencantumkan ancaman jangka panjang pada pengawasan peringatan dalam pemberitaan seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak mencantumkan ancaman jangka panjang pada pengawasan peringatan dalam pemberitaan.

1.b. Pengawasan Instrumental

Fungsi yang memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan. Informasi rutin yang akan dimasukkan

dalam pemberitaan itu yaitu Tahura adalah hutan konservasi, satu perusahaan tambang justru beralih melakukan kegiatan reboisasi, pertambangan boleh tetap beroperasi hingga izin berakhir, penjelasan alur izin hauling, penjelasan awal mula adanya pertambangan, penjelasan penetapan Bukit Soeharto menjadi Tahura, laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah muncul, penjelasan tiga jalan hauling melintas di Tahura, penjelasan awal Unmul dapat mengikuti kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH, permainan Dishut soal IUP, adanya penyalahgunaan kewenangan, kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), kondisi Tahura masih baik dan kegiatan pertambangan yang tidak melalui perencanaan tambang yang memadai.

1. Ada, jika mencantumkan informasi rutin pada pengawasan instrumental dalam pemberitaan seperti contoh di atas.
2. Tidak ada, jika tidak mencantumkan informasi rutin pada pengawasan instrumental dalam pemberitaan.

2. Fungsi Korelasi

Fungsi yang menghubungkan masyarakat dengan narasumber yang berada dalam peristiwa tersebut. Surat kabar mencari informasi berdasarkan narasumber yang memiliki hubungan kuat pada peristiwa yang terjadi. Sumber berita yang dihubungkan oleh surat kabar terhadap khalayak pembaca yaitu :

- 2.a. Lembaga pemerintah, badan tertinggi yang memerintah suatu negara, terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a) Lembaga pemerintah pusat: Pemerintahan yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah. Misalnya: Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

b) Lembaga pemerintah daerah: Pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara. Misalnya komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, DPRD Kaltim, Gubernur Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), komite II DPD RI, DPD Kaltim, Komisi I DPRD Kukar, Dinas Kehutanan (Dishut) Kukar, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dishut Kaltim.

1. Ada, jika dicantumkan lembaga pemerintah sebagai sumber berita.

- Lembaga pemerintah pusat
- Lembaga pemerintah daerah

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan lembaga pemerintah sebagai sumber berita.

2.b. Lembaga penegak hukum adalah lembaga yang tujuannya melakukan penyelidikan terhadap peristiwa atau kasus, terdiri dari lembaga penegak hukum internasional, lembaga penegak hukum nasional, dan lembaga penegak hukum lokal.

a) Lembaga penegak hukum internasional: Badan (organisasi) yang mengurus atau menyelidiki keilmuan masalah dunia.

b) Lembaga penegak hukum nasional: Badan (organisasi) yang mengurus atau menyelidiki keilmuan masalah kenegaraan.

c) Lembaga penegak hukum lokal: Badan (organisasi) yang mengurus atau menyelidiki keilmuan masalah daerah.

1. Ada, jika dicantumkan lembaga penegak hukum sebagai sumber berita.

- Lembaga penegak hukum internasional
- Lembaga penegak hukum nasional
- Lembaga penegak hukum lokal

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan lembaga penegak hukum sebagai sumber berita.

2.c. Lembaga swadaya masyarakat, adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat, terdiri dari lembaga swadaya masyarakat internasional, lembaga swadaya masyarakat nasional, dan lembaga swadaya masyarakat daerah.

a) Lembaga swadaya masyarakat internasional: organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dunia.

b) Lembaga swadaya masyarakat nasional: organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat keseluruhan di suatu negara tertentu.

c) Lembaga swadaya masyarakat daerah: organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Misalnya: Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Dinamisator Jatam Kaltim.

1. Ada, jika dicantumkan lembaga swadaya masyarakat sebagai sumber berita.

- Lembaga swadaya masyarakat internasional
- Lembaga swadaya masyarakat nasional
- Lembaga swadaya masyarakat daerah

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan lembaga swadaya masyarakat sebagai sumber berita.

2.d. Pakar, adalah orang yang mahir, menguasai, paham sekali dan memiliki kemampuan menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, terdiri dari pakar internasional, nasional, dan lokal.

a) Pakar internasional: orang yang mahir, menguasai, paham sekali dan memiliki kemampuan menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu untuk kasus-kasus seputar internasional.

b) Pakar nasional: orang yang mahir, menguasai, paham sekali dan memiliki kemampuan menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu untuk kasus-kasus seputar nasional..

c) Pakar lokal: orang yang mahir, menguasai, paham sekali dan memiliki kemampuan menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu untuk kasus-kasus seputar lokal. Misalnya Pakar Hukum Universitas Mulawarman (Unmul).

1. Ada, jika dicantumkan pakar sebagai sumber berita.

- Pakar internasional
- Pakar nasional
- Pakar lokal

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan pakar sebagai sumber berita.

2.e. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi (KBBI, 2008), dalam hal ini berada di lembaga pengajaran, terdiri dari akademisi internasional, akademisi nasional, dan akademisi lokal.

a) Akademisi internasional: orang yang berpendidikan tinggi dan membahas kasus-kasus seputar internasional.

b) Akademisi nasional: orang yang berpendidikan tinggi dan membahas kasus-kasus seputar nasional.

c) Akademisi lokal: orang yang berpendidikan tinggi dan membahas kasus-kasus seputar lokal. Misalnya, Pengamat hukum Unmul, Rektor Unmul, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan (PPHT) Unmul, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).

1. Ada, jika dicantumkan akademisi sebagai sumber berita.

- Akademisi internasional
- Akademisi nasional
- Akademisi lokal

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan akademisi sebagai sumber berita.

2.f. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan kegiatan dengan tujuan mencari keuntungan. Pengusaha ini dapat bergerak di bidang pertambangan, terdiri dari pengusaha asing, negara, swasta, multinasional, nasional, daerah, dan gabungan dari beberapa sub kategori di atas. Misalnya

a) Pengusaha asing: orang yang mengusahakan usaha asing.

b) Pengusaha swasta: orang yang mengusahakan usaha swasta. Misalnya, Direktur CV Parajava.

c) Pengusaha multinasional: orang yang mengusahakan usaha bersama dari dua negara yang berbeda.

d) Pengusaha nasional: orang yang mengusahakan usaha di wilayah nasional.

e) Pengusaha daerah: orang yang mengusahakan usaha di wilayah daerah.

1. Ada, jika dicantumkan pengusaha sebagai sumber berita.

- pengusaha asing
- pengusaha swasta
- pengusaha multinasional
- pengusaha nasional
- pengusaha daerah
- pengusaha asing dan multinasional
- pengusaha swasta dan multinasional
- pengusaha swasta dan daerah

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan pengusaha sebagai sumber berita.

2.g. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan ini dapat bergerak di bidang pertambangan, terdiri dari perusahaan asing, negara, swasta, multinasional, nasional, daerah, dan gabungan dari beberapa sub kategori di atas.

a) Perusahaan asing: kegiatan usaha yang modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional yang ditanam di dalamnya, besarnya kurang dari 51%

b) Perusahaan negara: kegiatan usaha yang dilakukan oleh negara sendiri.

c) Perusahaan swasta: kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta.

d) Perusahaan multinasional: kegiatan yang mengusahakan usaha bersama oleh dua negara yang berbeda .

e) Perusahaan nasional: kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.

f) Perusahaan daerah: kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan mengambil wilayah daerah

1. Ada, jika dicantumkan perusahaan sebagai sumber berita.

- Perusahaan asing
- Perusahaan Negara
- Perusahaan swasta
- Perusahaan multinasional
- Perusahaan nasional
- Perusahaan daerah
- Perusahaan asing dan multinasional
- Perusahaan swasta dan multinasional
- Perusahaan swasta dan daerah

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan perusahaan sebagai sumber berita.

2.h. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, terdiri dari masyarakat internasional, nasional, lokal dan gabungan masyarakat.

a) Masyarakat asing: sejumlah manusia yang berada di wilayah yang bukan kewarganegaraan orang tersebut.

b) Masyarakat nasional : sejumlah manusia yang berada di wilayah nasional.

c) Masyarakat daerah : sejumlah manusia yang berada di wilayah daerah.

1. Ada, jika dicantumkan masyarakat sebagai sumber berita.

- Masyarakat asing
- Masyarakat nasional
- Masyarakat daerah
- Masyarakat nasional dan lokal

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan masyarakat sebagai sumber berita.

3. Fungsi pewarisan sosial

Fungsi media massa yang mewariskan suatu budaya kepada masyarakat, baik itu berupa ide atau gagasan, aktivitas, dan benda-benda hasil kegiatan. Media tidak hanya mewariskan, tetapi juga harus memberikan ide-ide perubahan yang dapat ditiru dan diambil oleh masyarakat. Sebelum menyajikan sebuah pemberitaan, media massa sebaiknya memilih budaya yang akan dikenalkan oleh masyarakat, karena budaya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam media massa:

3.a. Ide positif, merupakan gagasan positif yang terkandung dalam nilai budaya pada pemberitaan dan sebaiknya dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, upaya pembuatan dan pengiriman surat ke Menhut, penindakan tegas dari aparat penegak hukum, pelaksanaan pengaduan secara paralel, perevisian SK Bupati, mencabut IUP, bicara langsung dengan Kapolri Timur Pradopo, melakukan *cross check*, Bupati langsung turun ke lokasi, pengujian dengan RUTR (rencana umum tata ruang), adanya penertiban, memeriksa temuan komisi II dan III, aktivitas pertambangan di area Tahura ditertibkan dan sebagainya.

1. Ada, jika dicantumkan ide positif sebagai nilai yang tampak dalam berita seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan ide positif sebagai nilai yang tampak dalam berita.

3.b. Ide negatif, merupakan gagasan negatif yang terkandung dalam nilai budaya pada pemberitaan. Nilai ini dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi masyarakat.

1. Ada, jika dicantumkan ide negatif sebagai nilai yang tampak dalam berita seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan ide negatif sebagai nilai yang tampak dalam berita.

3.c. Aktivitas positif, merupakan kegiatan positif yang mengandung nilai positif dalam pemberitaan dan kemudian dapat ditiru oleh masyarakat. Misalnya, adanya kontribusi perusahaan terhadap Tahura, Menhut telah tahu kerusakan Tahura, membentuk pansus pertambangan di DPD, melakukan inspeksi mendadak, pensosialisasian kepada masyarakat untuk tidak mengambil kayu, mengapresiasi permintaan komisi III untuk melakukan uji Amdal, permintaan rekomendasi dari Unmul mengenai jalan hauling dan sebagainya.

1. Ada, jika dicantumkan aktivitas positif sebagai nilai yang tampak dalam berita seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan aktivitas positif sebagai nilai yang tampak dalam berita.

3.d. Aktivitas negatif, merupakan kegiatan negatif yang mengandung nilai negatif dalam pemberitaan dan kemudian sebaiknya tidak ditiru oleh masyarakat. Misalnya, Unmul telah menarik diri dari kerja sama pemanfaatan jalan eks-HPH, penerbitan IUP yang tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan, tidak adanya pencantuman klausul mengenai IUP yang harus diselesaikan izin pinjam pakai kawasan hutan, penambangan *underground mining*, wakil rakyat yang setengah hati menyelesaikan persoalan tambang dan sebagainya.

1. Ada, jika dicantumkan aktivitas negatif sebagai nilai yang tampak dalam berita seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan aktivitas negatif sebagai nilai yang tampak dalam berita.

3.e. Benda-benda hasil kegiatan, merupakan benda-benda hasil dari aktivitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Misalnya, surat edaran pelarangan penggunaan jalan, undang-undang kehutanan dan pertambangan, perjanjian kerja sama, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan perundangan, surat kuasa pertambangan, dan sebagainya.

1. Ada, jika dicantumkan benda-benda hasil kegiatan sebagai nilai yang tampak dalam berita seperti contoh di atas.

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan benda-benda hasil kegiatan sebagai nilai yang tampak dalam berita.

4. Fungsi Kohesi

Fungsi media massa yang menyatukan semua pendapat baik pro dan kontra dari beberapa narasumber. Ketika media massa menyajikan berita, ada tiga sudut

pemberitaan yang sering dilakukan. Sudut pemberitaan ini merupakan satu cara agar dapat melihat apakah fungsi kohesi berjalan dengan seimbang dalam pemberitaan ini. Bentuknya adalah pernyataan dan pendapat yang *pro* dan *kontra*.

Kategori sudut pemberitaan dalam berita, yaitu :

4.a. Satu sisi: memasukkan pendapat dari satu pihak *pro* atau *kontra* saja yang terlibat langsung dalam peristiwa. Misalnya pendapat dari salah satu sumber berita yang *pro* terhadap penuntasan kasus ilegalitas izin usaha pertambangan dan izin hauling ataupun pendapat dari salah satu sumber berita yang *kontra* terhadap penuntasan kasus ilegalitas izin usaha pertambangan dan izin hauling.

1. Ada, jika dicantumkan pihak satu sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan seperti contoh di atas.

- Pihak *pro* yang terlibat
- Pihak *kontra* yang terlibat

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan pihak satu sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan.

4.b. Dua sisi: memasukkan pendapat dari dua pihak, yaitu *pro* dan *kontra* yang terlibat langsung serta memasukkan pendapat *pro* dan *kontra* yang tidak terlibat dalam peristiwa.

1. Ada, jika dicantumkan pihak dua sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan.

- Pihak *pro* dan *kontra* yang terlibat
- Pihak *pro* dan *kontra* yang tidak terlibat

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan pihak dua sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan.

4.c. Multi sisi: memasukkan pendapat dari berbagai pihak pro dan kontra yang terlibat langsung dalam peristiwa maupun yang tidak terlibat langsung

1. Ada, jika dicantumkan pihak multi sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan.

- Pihak pro dan kontra yang terlibat dan tidak terlibat

2. Tidak ada, jika tidak dicantumkan pihak multi sisi sebagai sudut pandang dalam pemberitaan.

J. Metodologi Penelitian

J.1. Jenis dan Teknik Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2007:55). Peneliti menggunakan metode analisis isi menurut Berelson dan Kerlinger. Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Kriyantono, 2006:230).

Penelitian ini dilakukan tidak untuk mencari kedalaman makna, tetapi untuk mencari hasil yang obyektif, sistematis, kuantitatif dan isi yang nyata. Hasil yang obyektif berarti penelitian yang dilakukan akan menghasilkan kesamaan jika melihat prosedur risetnya. Jika kategori sama digunakan untuk isi yang sama dan

dengan prosedur yang sama, maka hasil sama walau riset berbeda. Hasil yang sistematis maksudnya penentuan kategori dalam unit analisis mampu mencakup semua isi yang dianalisis. Hasil kuantitatif berarti penelitian memiliki hasil yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang telah dicatat. Hasil yang terakhir yaitu *manifest*. Hasil ini maksudnya adalah peneliti menganalisis berdasarkan apa yang terjadi, bukan berdasarkan apa yang dirasakan atau dinilai.

Analisis isi sendiri memiliki tujuan yang didefinisikan oleh Wimmer dan Dominick yang dikutip oleh Kriyantono. Tujuan analisis isi tersebut adalah menggambarkan isi komunikasi, yaitu menguraikan kecenderungan pada berita dalam media. Selain itu menguji hipotesis tentang karakteristik pesan, kemudian membandingkan isi media dengan dunia nyata, memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di masyarakat, serta mendukung studi efek media massa (Kriyantono, 2007:232-233).

Melalui penelitian ini, peneliti berharap akan mengetahui dan melihat apakah masing-masing isi komunikasi yaitu pemberitaan surat kabar, dalam hal ini Kaltim Post dan Tribun Kaltim menerapkan fungsi surat kabar terhadap permasalahan izin usaha pertambangan dan izin hauling pada Tahura Bukit Soeharto.

J.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam analisis isi, objek penelitian adalah teks, pesan, atau media itu sendiri (Kriyantono, 2007:233). Yang menjadi objek penelitian dari analisis isi ini adalah berita mengenai izin usaha pertambangan dan izin hauling dalam kasus Tahura

Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan di Surat Kabar Harian Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Kasus ini terjadi di Kalimantan Timur dan akan mengambil periode mulai dari 1 Juli hingga 31 Juli 2011.

Objek penelitian yaitu Surat Kabar Harian Kaltim Post dan Tribun Kaltim dipilih berdasarkan pada pertimbangan praktis, kesengajaan dan akademik. Praktis maksudnya karena mudah diperoleh oleh peneliti yang juga berasal dari Kaltim. Kesengajaan karena pemberitaan ini telah berjalan hampir dua tahun dan masalahnya belum selesai sampai tahun 2011 ini. SKH Kaltim Post telah memberitakannya dari tahun 2009, sedangkan Tribun Kaltim baru memberitakan kasus ini di tahun 2011. Akademik maksudnya peneliti belum pernah menemukan penelitian yang mengambil objek penelitian pada surat kabar daerah Kalimantan Timur, yaitu Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Kalaupun ada, metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian dari peneliti. Jika penelitian sebelumnya adalah menggunakan analisis framing, maka saat ini peneliti menggunakan analisis isi untuk melihat isi komunikasi dalam pemberitaan kasus Tahura Bukit Soeharto.

SKH Kaltim Post dan Tribun Kaltim merasa perlu memberitakan kasus ini karena kasus yang terjadi memiliki kedekatan geografis dengan kedua SKH yang berada di Kalimantan Timur tersebut. SKH Kaltim Post dan Tribun Kaltim peduli dengan masa depan Tahura Bukit Soeharto, sehingga fungsi surat kabar pemberitaan pun akan dirancang dalam isi berita untuk membuat masyarakat dan pemerintah paham kemudian mengambil keputusan.

J.3. Populasi dan Sampel

Sebelum menentukan sampel berita yang akan dipilih, maka peneliti harus menentukan populasi berita. Populasi menurut Sugiyono, adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian ditarik untuk suatu kesimpulan (Sugiyono dalam Kriyantono, 2007:149).

Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah berupa berita mengenai izin usaha pertambangan dan izin hauling dalam kasus Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan pada surat kabar harian Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode Juni hingga Agustus 2011. Jumlah populasi penelitian ada 50 berita yang terdiri dari berita Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode Juni hingga Agustus 2011.

Kemudian setelah populasi ditentukan, maka peneliti harus mengambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penarikan sampel nonacak. Anggota populasi terpilih sebagai sampel bisa jadi karena pertimbangan atau subjektivitas dari peneliti dan tidak didasarkan semata-mata pada hukum probabilitas (Eriyanto, 2011:115). Sampel penelitian yang dipilih adalah berita mengenai izin usaha pertambangan dan izin hauling dalam kasus Tahura Bukit Soeharto sebagai hutan raya dan kawasan pertambangan di SKH Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli sampai 31 Juli 2011. Periode tersebut dijadikan sampel penelitian karena berita di bulan Juni pada SKH Kaltim Post hanya memiliki dua berita. Kemudian pada bulan Agustus, SKH Kaltim Post hanya memiliki 3 berita. Pada bulan Juli 2011, SKH Kaltim Post memiliki 16 berita

mengenai izin hauling dan izin usaha pertambangan (IUP). Sedangkan di SKH Tribun Kaltim, peneliti menemukan 26 berita dengan kasus yang sama.

Kaltim Post lebih banyak menyoroti kasus ini pada rubrik *headline* atau rubrik utama dalam pemberitaan. Sedangkan Tribun Kaltim lebih banyak menyoroti kasus ini pada rubrik Tribun Etam, yaitu rubrik khusus daerah Kalimantan Timur.

TABEL 1.2.
Item Berita

No	Surat Kabar	Jumlah Berita
1.	Kaltim Post	16 item berita
2.	Tribun Kaltim	26 item berita
Total		42 item berita

Sumber: Olahan Peneliti

J.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Peneliti menggunakan beberapa dokumen sebagai sumber informasi dalam menginterpretasi data hasil observasi (Kriyantono, 2006:116). Data dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan (Kriyantono, 2006:43-44) dengan cara pendokumentasian berita yang sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu berita yang didapat dari surat kabar harian Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Data yang dikumpulkan ini termasuk data primer. Selain itu peneliti juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai data atau informasi tambahan oleh peneliti dalam melakukan penelitian (Kriyantono, 2006:43-44). Data sekunder menggunakan

studi pustaka dari sejumlah literatur, jurnal, skripsi, teori terkait pemberitaan serta penelitian yang sejenis dari segi metode, kategori analisis dan surat kabar.

Peneliti juga menggunakan alat pengumpulan data yaitu lembar koding (*coding sheet*). Lembar koding adalah alat pengumpulan data yang dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan pada unit analisis. Data hasil penelitian ini akan diolah secara kuantitatif dengan memperhatikan dan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis. pencatatan ini akan dilakukan oleh dua orang *intercoder* yang berpengalaman di bidang jurnalistik dan memiliki kemampuan dalam memahami isi teks berita.

J.5. Pengkodingan

Proses melakukan *coding*, seperti melakukan wawancara dalam penelitian survei. Bedanya, dalam analisis isi, *coder* berhadapan dengan isi (*content*) teks (Eriyanto, 2011:240). Pengkodingan ini digunakan untuk membaca dan mengukur data berita mengenai izin hauling dan izin usaha pertambangan dalam kasus Tahura Bukit Soeharto. Pengkoding akan dipilih sesuai minat dan kemampuan terhadap topik penelitian serta memiliki latar belakang ilmu komunikasi.

J.6. Reliabilitas

Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Bungin, 2005:96). Ketika melakukan metode analisis isi, uji reliabilitas perlu dilakukan agar peneliti dapat melihat konsistensi pengukuran data. Uji reliabilitas ini berguna untuk melihat apakah data yang dipakai dalam analisis isi dapat memenuhi harapan. Selain itu, kategorisasi yang dibuat langsung oleh peneliti belum teruji sehingga

uji reliabilitas ini penting. Reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur dan data yang dihasilkannya menggambarkan variasi yang ada dalam gejala yang sebenarnya (Eriyanto, 2011:282). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty, yaitu :

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh kedua pengkode

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang dikode oleh pengkode pertama dan kedua

Selanjutnya peneliti melakukan *pre-test* kepada dua orang *intercoder* untuk melihat apakah kedua pengkoding telah paham dengan unit analisis yang dipilih oleh peneliti. Dengan dilakukannya *pre-test*, maka peneliti berharap tidak ada unit analisis yang tumpang tindih. Batas dari penyimpangan unit analisis adalah 0,7. Jika *pre-test* menghasilkan nilai yang kurang dari 0,7, maka *coding sheet* tersebut dianggap tidak reliabel. Tetapi ketika nilai lebih dari 0,7, maka penelitian dapat dilanjutkan.

J.7. Analisis Data

Setelah berita melewati proses *coding*, maka peneliti melakukan rekap data. Hasil yang telah direkap kemudian dideskripsikan. Peneliti menggunakan statistik deskriptif yang dapat mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan data yang didapat dari analisis isi (Eriyanto, 2011:305).

Penelitian akan diolah dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang sudah diterapkan dalam kerangka teori melalui lembar coding sheet yang akan disusun ke dalam tabel untuk mempermudah dan mempercepat peneliti.

Kemudian peneliti memberikan gambaran arti dari data yang telah didapatkan.

Jika tabel yang sering digunakan adalah tabel frekuensi yang merupakan tabulasi tunggal, maka peneliti akan menggunakan tabulasi silang. Tabulasi silang adalah tabel di mana memasukkan dua atau lebih variabel (Eriyanto, 2011:306). Dengan tabulasi silang, dua variabel tersebut dihubungkan, kemudian disajikan dengan mendeskripsikan dua variabel tersebut. Misalnya, berita yang memiliki unsur fungsi pengawasan, sebagian besar apakah juga memiliki fungsi pewarisan sosial? Atau berita yang memiliki fungsi pewarisan sosial, sebagian besar dikemukakan oleh siapa sebagai sumber berita. Cara menjawabnya dengan menghubungkan dua variabel tersebut dalam satu tabel (Eriyanto, 2011:306).